

Realisasi Anggaran Unit Kerja Per 31 Agustus 2026

1. Rincian Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu RI sebagai berikut:

URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI		52.233.153.000	28.758.961.260	23.474.191.740	55,06%	
OPERASIONAL		41.198.937.000	23.991.161.874	17.207.775.126	58,23%	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	41.198.937.000	23.991.161.874	17.207.775.126	58,23%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	41.198.937.000	23.991.161.874	17.207.775.126	58,23%	
001	Gaji dan Tunjangan	154.271.000	12.512.000	141.759.000	8,11%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	41.044.666.000	23.978.649.874	17.066.016.126	58,42%	
NON OPERASIONAL		11.034.216.000	4.767.799.386	6.266.416.614	43,21%	
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	226.750.000	145.451.138	81.298.862	64,15%	
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	226.750.000	145.451.138	81.298.862	64,15%	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	4.620.454.000	2.925.087.612	1.695.366.388	63,31%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.620.454.000	2.925.087.612	1.695.366.388	63,31%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.187.012.000	1.697.260.636	4.489.751.364	27,43%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.187.012.000	1.697.260.636	4.489.751.364	27,43%	

Catatan:
Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki total pagu sebesar Rp.52.233.153.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.474.191.740,00 atau sebesar **55,06%**. Untuk Anggaran Operasional sebesar Rp.41.198.937.000,00 realisasi sampai dengan 31 Agustus 2026 sebesar Rp.23.991.161.874,00 atau sebesar **58,23%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp11.034.216.00, realisasi sebesar Rp4.767.799.386 atau sebesar **43,21%**. Komponen Gaji dan Lembur pada Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan komponen untuk lembur pegawai. Sampai dengan 31 Agustus 2026 masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan masih terdapat kontrak kegiatan dan pembayaran UH kegiatan yang belum dibayarkan. Selain itu masih terdapat GUP yang masih dalam proses verifikasi dan perjalanan dinas yang masih dalam proses kelengkapan dokumen.

BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		91.062.656.000	64.479.246.750	26.583.409.250	70,81%	
OPERASIONAL		88.628.564.000	62.388.437.917	26.240.126.083	70,39%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	88.628.564.000	62.388.437.917	26.240.126.083	70,39%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	88.628.564.000	62.388.437.917	26.240.126.083	70,39%	
001	Gaji dan Tunjangan	81.058.534.000	57.114.577.879	23.943.956.121	70,46%	Gaji dan Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.570.030.000	5.273.860.038	2.296.169.962	69,67%	
NON OPERASIONAL		2.434.092.000	2.090.808.833	343.283.167	85,90%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	1.223.486.000	1.104.010.667	119.475.333	90,23%	
EBA.Z06	Layanan BMN pada Tingkat K/L	440.258.000	374.422.193	65.835.807	85,05%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	783.228.000	729.588.474	53.639.526	93,15%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.210.606.000	986.798.166	223.807.834	81,51%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.210.606.000	986.798.166	223.807.834	81,51%	
Catatan : Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp91.062.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.479.246.750,00 atau sebesar 70,81% . Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar 88.628.564.000,00, realisasi sebesar 70,39% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp2.434.092.000,00, realisasi sebesar Rp2.090.808.833,00 atau sebesar 85,90% .						
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		12.284.628.000	4.821.763.507	7.462.864.493	39,25%	
OPERASIONAL		5.178.824.000	2.131.068.550	3.047.755.450	41,15%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	5.178.824.000	2.131.068.550	3.047.755.450	41,15%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	5.178.824.000	2.131.068.550	3.047.755.450	41,15%	
001	Gaji dan Tunjangan	112.824.000	0	112.824.000	0,00%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.066.000.000	2.131.068.550	2.934.931.450	42,07%	
NON OPERASIONAL		7.105.804.000	2.690.694.957	4.415.109.043	37,87%	
4355	Pemeriksaan. Pengendalian. Dan Pengawasan Internal	42.842.000	0	42.842.000	0,00%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	42.842.000	0	42.842.000	0,00%	
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	569.660.000	305.431.192	264.228.808	53,62%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	569.660.000	305.431.192	264.228.808	53,62%	

6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.493.302.000	2.385.263.765	4.108.038.235	36,73%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.493.302.000	2.385.263.765	4.108.038.235	36,73%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp12.284.628.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.821.763.507,00 atau sebesar **39,25%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp5.178.824.000,00, realisasi sebesar Rp2.131.068.550,00 atau sebesar **41,15%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan Pagu sebesar Rp7.105.804.000,00, realisasi sebesar Rp2.690.694.957,00 atau sebesar **37,87%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan masih terdapat kegiatan penyusunan indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum yang baru akan dilaksanakan mendekati akhir tahun. Selain itu terdapat perubahan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada semester II. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan komponen lembur pegawai yang akan direalisasikan pada bulan Juli s.d September 2026. Sedangkan belanja operasional dan pemeliharaan sedang diakumulasi.

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM		154.956.141.000	67.758.449.834	87.197.691.166	43,73%	
OPERASIONAL		146.669.587.000	61.635.055.656	85.034.531.344	42,02%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	146.669.587.000	61.635.055.656	85.034.531.344	42,02%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	146.669.587.000	61.635.055.656	86.042.329.190	42,02%	
001	Gaji dan Tunjangan	251.640.000	55.231.000	212.820.000	21,95%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	146.417.947.000	61.579.824.656	85.829.509.190	42,06%	
NON OPERASIONAL		8.286.554.000	6.123.394.178	2.163.159.822	73,90%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	1.787.450.000	1.635.444.505	152.005.495	91,50%	
EBA.959	Layanan Protokoler	35.640.000	10.245.000	25.395.000	28,75%	
EBA.962	Layanan Umum	464.360.000	356.884.640	112.998.480	76,86%	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.287.450.000	1.268.314.865	19.135.135	98,51%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.435.067.000	4.487.949.673	4.143.860.497	69,74%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.921.440.000	3.173.791.365	2.329.134.104	80,93%	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.513.627.000	1.314.158.308	1.814.726.393	52,28%	
4355	Pemeriksaan. Pengendalian. Dan Pengawasan Internal	64.037.000	0	64.037.000	0,00%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	64.037.000	0	64.037.000	0,00%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp154.956.141.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.758.449.834,00 atau sebesar **43,73%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp146.669.587.000,00, realisasi sebesar Rp61.635.055.656,00 atau sebesar **42,02%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp8.286.554.000,00, realisasi sebesar Rp6.123.394.178,00 atau sebesar **73,90%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Pada bagian umum hal ini disebabkan masih belum terealisasinya sewa Gedung E, Sewa CCTV Gedung E, Sewa

Internet Gedung E, Perpanjangan Sewa Gedung D (akhir tahun), CCTV Gedung D, pemeliharaan lantai 3 dan 4 Gedung A, pemeliharaan Gedung E. Pada Layanan Protokoler, dokumen pertanggungjawaban ada di bulan September 2026. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum merupakan komponen lembur pegawai.

INSPEKTORAT UTAMA		5.126.681.000	2.736.779.875	2.389.901.125	53,38%	
OPERASIONAL		399.516.000	56.884.014	342.631.986	14,24%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	399.516.000	56.884.014	342.631.986	14,24%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	399.516.000	56.884.014	342.631.986	14,24%	
001	Gaji dan Tunjangan	201.516.000	48.096.000	153.420.000	23,87%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	198.000.000	8.788.014	189.211.986	4,44%	
NON OPERASIONAL		4.727.165.000	2.679.895.861	2.047.269.139	56,69%	
4355	Pemeriksaan. Pengendalian. Dan Pengawasan Internal	3.191.975.000	2.165.203.805	1.026.771.195	67,83%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.191.975.000	2.165.203.805	1.026.771.195	67,83%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.535.190.000	514.692.056	1.020.497.944	33,53%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.535.190.000	514.692.056	1.020.497.944	33,53%	
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.126.681.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.736.779.875,00 atau sebesar 53,38% . Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp399.516.000,00, realisasi sebesar Rp56.884.014,00 atau sebesar 14,24% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp4.727.165.000,00, realisasi sebesar Rp2.679.895.861,00 atau sebesar 56,69% . Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Untuk operasional pemeliharaan kantor direimburse ke bagian umum. Pada Wilayah I, kegiatan audit kinerja (2 output) akan dilaksanakan sekitan bulan September s/d Oktober dan kegiatan Reviu dan Pengawasan lainnya sudah terjadwal s/d November 2026. Pada Wilayah III kegiatan audit kinerja (2 output) akan dilaksanakan sekitan bulan September s/d Oktober dan kegiatan Reviu dan Pengawasan lainnya sudah terjadwal s/d November 2026. Komponen gaji dan Tunjangan pada Inspektorat Utama merupakan komponen lembur pegawai.						
PUSAT DATA DAN INFORMASI		28.933.595.000	9.801.407.040	19.132.187.960	33,88%	
OPERASIONAL		18.927.471.000	3.528.791.801	15.398.679.199	18,64%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	18.927.471.000	3.528.791.801	15.398.679.199	18,64%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	18.927.471.000	3.528.791.801	15.398.679.199	18,64%	
001	Gaji dan Tunjangan	75.871.000	27.478.000	48.393.000	36,22%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	18.851.600.000	3.501.313.801	15.350.286.199	18,57%	

NON OPERASIONAL		10.006.124.000	6.272.615.239	3.733.508.761	62,69%	
4356	Pengelola Data dan Informasi	1.392.374.000	933.428.566	458.945.434	67,04%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.392.374.000	933.428.566	458.945.434	67,04%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	63.750.000	62.749.030	1.000.970	98,43%	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	63.750.000	62.749.030	1.000.970	98,43%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	8.050.000.000	4.825.851.207	3.224.148.793	59,95%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.050.000.000	4.825.851.207	3.224.148.793	59,95%	
7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	500.000.000	450.586.436	49.413.564	90,12%	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	500.000.000	450.586.436	49.413.564	90,12%	
002	Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	500.000.000	450.586.436	49.413.564	90,12%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp28.933.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.801.407.040,00 atau sebesar **33,88%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp18.927.471.000,00, realisasi sebesar Rp3.528.791.801,00 atau sebesar **18,64%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp10.006.124.000,00, realisasi sebesar Rp6.272.615.239,00 atau sebesar **62,69%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilakukan apada bulan Agustus s.d Desember 2026. Jadwal renewal lisensi juga belum memasuki waktu pelaksanaan. Komponen Gaji dan Pegawai pada Pusat Data dan Informasi merupakan komponen lembur pegawai.

PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		33.941.647.000	20.789.443.843	13.152.203.157	61,25%	
OPERASIONAL		24.173.603.000	14.816.941.806	9.356.661.194	61,29%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	24.173.603.000	14.816.941.806	9.356.661.194	61,29%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	24.173.603.000	14.816.941.806	9.356.661.194	61,29%	
001	Gaji dan Tunjangan	105.803.000	52.838.000	52.965.000	49,94%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.067.800.000	14.764.103.806	9.303.696.194	61,34%	
NON OPERASIONAL		9.768.044.000	5.972.502.037	3.795.541.963	61,14%	
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	433.130.000	158.709.300	274.420.700	36,64%	
ABC	Kebijakan Bidang Politik	433.130.000	158.709.300	274.420.700	36,64%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	9.334.914.000	5.813.792.737	3.521.121.263	62,28%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	327.800.000	312.409.100	15.390.900	95,30%	
EBC	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.007.114.000	5.501.383.637	3.505.730.363	61,08%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp33.941.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.789.443.843,00 atau sebesar **61,25%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp24.173.603.000,00, realisasi sebesar Rp14.816.941.806,00 atau sebesar **61,29%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp9.768.044.000,00, realisasi sebesar Rp5.972.502.037,00 atau sebesar **61,14%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Terdapat Jasa Konsultan yang masih menunggu penyusunan Indeks Kualitas Kebijakan. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan merupakan komponen lembur pegawai.

BIRO FASILITASI PENGAWASAN		50.788.182.000	2.693.054.738	48.095.127.262	5,30%	
OPERASIONAL		45.278.824.000	129.705.751	45.149.118.249	0,29%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	45.278.824.000	129.705.751	45.149.118.249	0,29%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	45.278.824.000	129.705.751	45.149.118.249	0,29%	
001	Gaji dan Tunjangan	112.824.000	0	112.824.000	0,00%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	45.166.000.000	129.705.751	45.036.294.249	0,29%	
NON OPERASIONAL		5.509.358.000	2.563.348.987	2.946.009.013	46,53%	
4358	Fasilitasi Pengawasan	1.268.760.000	390.447.907	878.312.093	30,77%	
ABC	Kebijakan Bidang Politik	186.240.000	39.692.200	146.547.800	21,31%	
001	Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu	166.800.000	34.476.500	132.323.500	20,67%	
002	Penilaian Kepuasan Pelayanan	19.440.000	5.215.700	14.224.300	26,83%	
AEC	Kerja Sama	474.985.000	229.966.222	245.018.778	48,42%	
001	Kerjasama Antar Lembaga	474.985.000	229.966.222	245.018.778	48,42%	
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	607.535.000	120.789.485	486.745.515	19,88%	
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu	607.535.000	120.789.485	486.745.515	19,88%	
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	107.775.000	86.063.000	21.712.000	79,85%	
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	107.775.000	86.063.000	21.712.000	79,85%	
001	Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	107.775.000	86.063.000	21.712.000	79,85%	
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	70.925.000	65.889.275	5.035.725	92,90%	
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	70.925.000	65.889.275	5.035.725	92,90%	
001	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat	70.925.000	65.889.275	5.035.725	92,90%	

7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	61.903.000	4.123.822	57.779.178	6,66%	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	61.903.000	4.123.822	57.779.178	6,66%	
001	Cetak Biru (Blueprint) Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	61.903.000	4.123.822	57.779.178	6,66%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	3.999.995.000	2.016.824.983	1.983.170.017	50,42%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.999.995.000	2.016.824.983	1.983.170.017	50,42%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp50.788.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.693.054.738,00 atau sebesar **5,30%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp45.278.824.000,00, realisasi sebesar Rp129.705.751,00 atau sebesar **0,29%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp5.509.358.000,00, realisasi sebesar Rp2.563.348.987,00 atau sebesar **46,53%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan terdapat Anggaran Rapat dalam Kantor dan Perjalanan Dinas Pengawasan yang rencana akan dilaksanakan pada Semester II. Kegiatan pada sistem informasi pengawasan masih menunggu arahan dari Pimpinan.

Pada bulan Agustus 2026, terdapat anggaran yang baru ditambahkan, sehingga masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan September s.d Desember 2026 dan terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi masih dalam proses melengkapi SPJ, juga terdapat pelaksanaan kegiatan yang masih menunggu pengajuan dari Mitra kerja yaitu Anggota Komisi II DPR RI. Untuk belanja kebutuhan operasional disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Biro Fasilitas Pengawasan merupakan komponen lembur pegawai.

BIRO FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN		29.620.159.000	13.687.437.458	15.932.721.542	46,21%	
OPERASIONAL		27.169.193.000	12.353.541.095	14.815.651.905	45,47%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	27.169.193.000	12.353.541.095	14.815.651.905	45,47%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	27.169.193.000	12.353.541.095	14.815.651.905	45,47%	
001	Gaji dan Tunjangan	103.393.000	46.835.000	56.558.000	45,30%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	27.065.800.000	12.306.706.095	14.759.093.905	45,47%	
NON OPERASIONAL		2.450.966.000	1.333.896.363	1.117.069.637	54,42%	
4358	Pelayanan Publik Lainnya	1.251.640.000	908.941.312	342.698.688	72,62%	
ABC	Kebijakan Bidang Politik	388.200.000	338.327.238	49.872.762	87,15%	
001	Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu	361.050.000	315.383.948	45.666.052	87,35%	
002	Penilaian Kepuasan Pelayanan	27.150.000	22.943.290	4.206.710	84,51%	
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	863.440.000	570.614.074	292.825.926	66,09%	
001	Layanan Penanganan Pelanggaran	863.440.000	570.614.074	292.825.926	66,09%	

6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.142.820.000	424.955.051	717.864.949	37,18%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.142.820.000	424.955.051	717.864.949	37,18%	
7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	56.506.000	0	56.506.000	0,00%	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	56.506.000	0	56.506.000	0,00%	
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp29.620.159.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.687.437.458,00 atau sebesar 46,21% . Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp27.169.193.000,00, realisasi sebesar Rp12.353.541.095,00 atau sebesar 45,47% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp2.450.966.000,00, realisasi sebesar Rp1.333.896.363,00 atau sebesar 54,42% . Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan terdapat kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d Desember 2026. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan September s.d Desember 2026 dan terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi masih dalam proses melengkapi SPJ. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran merupakan komponen lembur pegawai.						
BIRO FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES		1.266.656.000	357.967.091	908.688.909	28,26%	
OPERASIONAL		163.583.000	93.426.706	70.156.294	57,11%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	163.583.000	93.426.706	70.156.294	57,11%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	163.583.000	93.426.706	70.156.294	57,11%	
001	Gaji dan Tunjangan	97.583.000	56.671.000	40.912.000	58,07%	Lembur Pegawai
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	66.000.000	36.755.706	29.244.294	55,69%	
NON OPERASIONAL		1.103.073.000	264.540.385	838.532.615	23,98%	
4358	Fasilitasi Pengawasan	1.019.473.000	264.540.385	716.500.000	25,95%	
ABC	Kebijakan Bidang Politik	147.500.000	79.336.314	70.250.000	53,79%	
001	Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu	82.350.000	79.336.314	70.250.000	96,34%	
002	Penilaian Kepuasan Pelayanan	65.150.000	0	70.250.000	0,00%	
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	871.973.000	185.204.071	646.250.000	21,24%	
002	Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	871.973.000	185.204.071	646.250.000	21,24%	
7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	83.600.000	0	83.600.000	0,00%	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	83.600.000	0	83.600.000	0,00%	
001	Cetak Biru (Blueprint) Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	83.600.000	0	83.600.000	0,00%	

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.266.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp357.967.091,00 atau sebesar **28,26%**. Untuk pagu anggaran Operasional sebesar Rp163.583.000,00, realisasi sebesar Rp93.426.706,00 atau sebesar **57,11%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp1.103.073.000,00, realisasi sebesar Rp264.540.385,00 atau sebesar **23,98%**. Sampai dengan 31 Agustus 2026, masih terdapat realisasi yang masih dibawah 50%. Hal ini disebabkan terdapat kegiatan berupa pelaksanaan SKM dan konsultasi penyusunan IKM pada Biro FPSP yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan ke-IV TA 2026. Untuk layanan penyelesaian sengketa kegiatan didasarkan pada arahan dari Anggota Bawaslu (Kordiv HPS), berupa kegiatan fullday serta perjalanan dinas persiapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Bulan September s.d Oktober 2026. Sedangkan untuk penguatan dan integrasi system informasi pengawasan pemilu, realisasi dilaksanakan secara proposional setiap bulannya. Komponen Gaji dan Tunjangan pada Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses merupakan komponen lembur pegawai.

PAGU BELUM DIBAGI KE PPK		232.633.609.000	0	232.633.609.000	0,00%	
6849	Pengelolaan Keuangan. BMN. Dan Umum	226.059.174.000	0	226.059.174.000	0,00%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	226.059.174.000	0	226.059.174.000	0,00%	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	226.059.174.000	0	226.059.174.000	0,00%	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.574.435.000	0	6.574.435.000	0,00%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.574.435.000	0	6.574.435.000	0,00%	
JUMLAH		699.447.107.000	219.184.511.396	480.262.595.604	31,34%	

2. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Tertinggi per 31 Agustus 2026 berdasarkan Realisasi Akrual pada Aplikasi SAKTI

Realisasi anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 5 (lima) tertinggi sampai dengan 31 Agustus 2026 adalah Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (91,91%), Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (89,18%), Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (87,19%), Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat (86,77%) dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (86,37%). Rincian belanja berdasarkan operasional dan non operasional sebagai berikut:

URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
690911 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA		17.359.968.000	15.954.900.489	1.405.067.511	91,91%
OPERASIONAL		17.093.834.000	15.779.659.078	1.314.174.922	92,31%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	17.093.834.000	15.779.659.078	1.314.174.922	92,31%
EBA.994	Layanan Perkantoran	17.093.834.000	15.779.659.078	1.314.174.922	92,31%
001	Gaji dan Tunjangan	10.046.444.000	9.799.253.909	247.190.091	97,54%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.047.390.000	5.980.405.169	1.066.984.831	84,86%
NON OPERASIONAL		266.134.000	175.241.411	90.892.589	65,85%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	69.652.000	47.313.490	22.338.510	67,93%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8.940.000	5.590.000	3.350.000	62,53%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	60.712.000	41.723.490	18.988.510	68,72%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	27.500.000	27.500.000	0	100,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27.500.000	27.500.000	0	100,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	9.952.000	6.704.000	3.248.000	67,36%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.952.000	6.704.000	3.248.000	67,36%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	9.259.000	7.790.000	1.469.000	84,13%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	9.259.000	7.790.000	1.469.000	84,13%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	28.116.000	12.982.400	15.133.600	46,17%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.116.000	12.982.400	15.133.600	46,17%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	37.636.000	28.782.238	8.853.762	76,48%

EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	1.370.000	1.220.000	150.000	89,05%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36.266.000	27.562.238	8.703.762	76,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	84.019.000	44.169.283	39.849.717	52,57%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	56.935.000	28.004.283	28.930.717	49,19%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	27.084.000	16.165.000	10.919.000	59,68%
417793 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA		16.275.738.000	14.515.454.571	1.760.283.429	89,18%
OPERASIONAL		16.119.860.000	14.425.790.870	1.694.069.130	89,49%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	16.119.860.000	14.425.790.870	1.694.069.130	89,49%
EBA.994	Layanan Perkantoran	16.119.860.000	14.425.790.870	1.694.069.130	89,49%
001	Gaji dan Tunjangan	10.443.224.000	9.031.499.943	1.411.724.057	86,48%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.676.636.000	5.394.290.927	282.345.073	95,03%
NON OPERASIONAL		155.878.000	89.663.701	66.214.299	57,52%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	46.595.000	29.511.936	17.083.064	63,34%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	10.000.000	2.566.000	7.434.000	25,66%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	36.595.000	26.945.936	9.649.064	73,63%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	21.251.000	11.546.000	9.705.000	54,33%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21.251.000	11.546.000	9.705.000	54,33%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	4.154.000	3.120.500	1.033.500	75,12%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.154.000	3.120.500	1.033.500	75,12%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	8.530.000	1.720.000	6.810.000	20,16%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	8.530.000	1.720.000	6.810.000	20,16%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	10.210.000	1.240.000	8.970.000	12,14%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.210.000	1.240.000	8.970.000	12,14%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	16.980.000	7.071.365	9.908.635	41,65%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	1.680.000	0	1.680.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.300.000	7.071.365	8.228.635	46,22%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	48.158.000	35.453.900	12.704.100	73,62%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.353.000	10.240.500	12.112.500	45,81%

EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	25.805.000	25.213.400	591.600	97,71%
686463 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH		25.382.191.000	22.131.149.355	3.251.041.645	87,19%
OPERASIONAL		25.093.872.000	21.924.760.188	3.169.111.812	87,37%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	25.093.872.000	21.924.760.188	3.169.111.812	87,37%
EBA.994	Layanan Perkantoran	25.093.872.000	21.924.760.188	3.169.111.812	87,37%
001	Gaji dan Tunjangan	18.920.458.000	18.430.946.891	489.511.109	97,41%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.173.414.000	3.493.813.297	2.679.600.703	56,59%
NON OPERASIONAL		288.319.000	206.389.167	81.929.833	71,58%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	70.348.000	57.671.168	12.676.832	81,98%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	24.556.000	22.133.568	2.422.432	90,14%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	45.792.000	35.537.600	10.254.400	77,61%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	57.250.000	43.221.500	14.028.500	75,50%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	57.250.000	43.221.500	14.028.500	75,50%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	14.343.000	6.300.000	8.043.000	43,92%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14.343.000	6.300.000	8.043.000	43,92%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	2.090.000	825.000	1.265.000	39,47%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	2.090.000	825.000	1.265.000	39,47%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	20.000.000	10.575.000	9.425.000	52,88%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.000.000	10.575.000	9.425.000	52,88%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	62.274.000	45.975.650	16.298.350	73,83%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	2.090.000	570.000	1.520.000	27,27%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23.816.000	23.505.050	310.950	98,69%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36.368.000	21.900.600	14.467.400	60,22%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	62.014.000	41.820.849	20.193.151	67,44%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	44.924.000	31.302.249	13.621.751	69,68%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	17.090.000	10.518.600	6.571.400	61,55%

686510 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT		17.349.973.000	15.054.878.094	2.295.094.906	86,77%
OPERASIONAL		17.155.966.000	14.962.331.218	2.193.634.782	87,21%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	17.155.966.000	14.962.331.218	2.193.634.782	87,21%
EBA.994	Layanan Perkantoran	17.155.966.000	14.962.331.218	2.193.634.782	87,21%
001	Gaji dan Tunjangan	11.025.982.000	10.362.276.391	663.705.609	93,98%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.129.984.000	4.600.054.827	1.529.929.173	75,04%
NON OPERASIONAL		194.007.000	92.546.876	101.460.124	47,70%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	50.368.000	35.775.876	14.592.124	71,03%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7.100.000	2.900.000	4.200.000	40,85%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	43.268.000	32.875.876	10.392.124	75,98%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	28.951.000	28.390.000	561.000	98,06%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	28.951.000	28.390.000	561.000	98,06%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	9.438.000	3.830.000	5.608.000	40,58%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.438.000	3.830.000	5.608.000	40,58%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	3.550.000	1.600.000	1.950.000	45,07%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	3.550.000	1.600.000	1.950.000	45,07%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	7.100.000	1.700.000	5.400.000	23,94%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.100.000	1.700.000	5.400.000	23,94%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	17.750.000	9.175.000	8.575.000	51,69%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	3.550.000	1.325.000	2.225.000	37,32%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14.200.000	7.850.000	6.350.000	55,28%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	76.850.000	12.076.000	64.774.000	15,71%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	73.300.000	8.526.000	64.774.000	11,63%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.550.000	3.550.000	0	100,00%
686250 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN		35.973.502.000	31.069.062.680	4.904.439.320	86,37%
OPERASIONAL		35.628.572.000	30.878.231.468	4.750.340.532	86,67%

6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	35.628.572.000	30.878.231.468	4.750.340.532	86,67%
EBA.994	Layanan Perkantoran	35.628.572.000	30.878.231.468	4.750.340.532	86,67%
001	Gaji dan Tunjangan	26.982.688.000	24.890.740.999	2.091.947.001	92,25%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.645.884.000	5.987.490.469	2.658.393.531	69,25%
NON OPERASIONAL		344.930.000	190.831.212	154.098.788	55,32%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80.166.000	31.663.776	48.502.224	39,50%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13.030.000	5.820.500	7.209.500	44,67%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	67.136.000	25.843.276	41.292.724	38,49%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	74.348.000	72.580.000	1.768.000	97,62%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	74.348.000	72.580.000	1.768.000	97,62%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	17.390.000	2.740.000	14.650.000	15,76%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	17.390.000	2.740.000	14.650.000	15,76%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	7.500.000	2.973.400	4.526.600	39,65%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	7.500.000	2.973.400	4.526.600	39,65%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	14.473.000	2.778.945	11.694.055	19,20%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.473.000	2.778.945	11.694.055	19,20%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	62.976.000	21.703.531	41.272.469	34,46%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	13.980.000	8.660.531	5.319.469	61,95%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	48.996.000	13.043.000	35.953.000	26,62%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	88.077.000	56.391.560	31.685.440	64,03%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	78.092.000	53.772.760	24.319.240	68,86%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.985.000	2.618.800	7.366.200	26,23%

3. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Terendah per 31 Agustus 2026 berdasarkan Realisasi AkruaI pada Aplikasi SAKTI

Realisasi anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 5 (lima) terendah sampai dengan 31 Agustus 2026 adalah Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua (70,20%), Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo (72,68%), Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (75,11%), Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (75,94%) dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (77,42%). Rincian belanja berdasarkan operasional dan non operasional sebagai berikut:

URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
686506 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA		23.169.534.000	16.264.742.886	6.904.791.114	70,20%
OPERASIONAL		22.857.229.000	16.142.868.186	6.714.360.814	70,62%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	22.857.229.000	16.142.868.186	6.714.360.814	70,62%
EBA.994	Layanan Perkantoran	22.857.229.000	16.142.868.186	6.714.360.814	70,62%
001	Gaji dan Tunjangan	14.777.520.000	10.039.943.427	4.737.576.573	67,94%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.079.709.000	6.102.924.759	1.976.784.241	75,53%
NON OPERASIONAL		312.305.000	121.874.700	190.430.300	39,02%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	61.524.000	23.433.700	38.090.300	38,09%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	14.864.000	3.600.000	11.264.000	24,22%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	46.660.000	19.833.700	26.826.300	42,51%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	40.250.000	23.066.000	17.184.000	57,31%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	40.250.000	23.066.000	17.184.000	57,31%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	8.408.000	510.000	7.898.000	6,07%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8.408.000	510.000	7.898.000	6,07%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	12.670.000	7.233.500	5.436.500	57,09%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	12.670.000	7.233.500	5.436.500	57,09%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	30.825.000	10.927.000	19.898.000	35,45%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30.825.000	10.927.000	19.898.000	35,45%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	49.089.000	19.923.000	29.166.000	40,59%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	7.240.000	3.364.000	3.876.000	46,46%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	41.849.000	16.559.000	25.290.000	39,57%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	109.539.000	36.781.500	72.757.500	33,58%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	104.749.000	36.531.500	68.217.500	34,88%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.790.000	250.000	4.540.000	5,22%
LOCK PAGU		265.654.000	0	265.654.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	250.141.000	0	250.141.000	0,00%

EBA.994	Layanan Perkantoran	245.293.000	0	245.293.000	0,00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	245.293.000	0	245.293.000	0,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	998.000	0	998.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.850.000	0	3.850.000	0,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.472.000	0	6.472.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.562.000	0	5.562.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	910.000	0	910.000	0,00%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5.411.000	0	5.411.000	0,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.980.000	0	1.980.000	0,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.431.000	0	3.431.000	0,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	1.240.000	0	1.240.000	0,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.240.000	0	1.240.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	630.000	0	630.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	630.000	0	630.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.760.000	0	1.760.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.760.000	0	1.760.000	0,00%
686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO		12.998.759.000	9.447.556.084	3.551.202.916	72,68%
OPERASIONAL		12.838.180.000	9.326.635.084	3.511.544.916	72,65%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	12.838.180.000	9.326.635.084	3.511.544.916	72,65%
EBA.994	Layanan Perkantoran	12.838.180.000	9.326.635.084	3.511.544.916	72,65%
001	Gaji dan Tunjangan	9.532.282.000	7.597.873.005	1.934.408.995	79,71%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.305.898.000	1.728.762.079	1.577.135.921	52,29%
NON OPERASIONAL		160.579.000	120.921.000	39.658.000	75,30%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	41.599.000	38.502.000	3.097.000	92,56%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.136.000	773.000	363.000	68,05%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	40.463.000	37.729.000	2.734.000	93,24%

7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	27.500.000	23.725.200	3.774.800	86,27%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27.500.000	23.725.200	3.774.800	86,27%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	6.238.000	1.000.000	5.238.000	16,03%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6.238.000	1.000.000	5.238.000	16,03%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	480.000	0	480.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	480.000	0	480.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	960.000	474.000	486.000	49,38%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	960.000	474.000	486.000	49,38%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	19.920.000	12.605.000	7.315.000	63,28%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	480.000	160.000	320.000	33,33%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.440.000	12.445.000	6.995.000	64,02%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	63.882.000	44.614.800	19.267.200	69,84%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	56.778.000	44.614.800	12.163.200	78,58%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.104.000	0	7.104.000	0,00%
686311 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA		14.810.220.000	11.124.318.628	3.685.901.372	75,11%
OPERASIONAL		14.651.977.000	11.029.761.842	3.622.215.158	75,28%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	14.651.977.000	11.029.761.842	3.622.215.158	75,28%
EBA.994	Layanan Perkantoran	14.651.977.000	11.029.761.842	3.622.215.158	75,28%
001	Gaji dan Tunjangan	11.150.794.000	8.762.905.538	2.387.888.462	78,59%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.501.183.000	2.266.856.304	1.234.326.696	64,75%
NON OPERASIONAL		158.243.000	94.556.786	63.686.214	59,75%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	29.217.000	9.705.000	19.512.000	33,22%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	14.400.000	9.505.000	4.895.000	66,01%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14.817.000	200.000	14.617.000	1,35%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	33.500.000	32.884.650	615.350	98,16%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	33.500.000	32.884.650	615.350	98,16%

7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	3.608.000	400.000	3.208.000	11,09%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.608.000	400.000	3.208.000	11,09%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	2.800.000	1.400.000	1.400.000	50,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	2.800.000	1.400.000	1.400.000	50,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	23.062.000	12.362.000	10.700.000	53,60%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.062.000	12.362.000	10.700.000	53,60%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	34.713.000	23.625.716	11.087.284	68,06%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	3.600.000	1.287.000	2.313.000	35,75%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.713.000	10.524.060	188.940	98,24%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	20.400.000	11.814.656	8.585.344	57,91%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	31.343.000	14.179.420	17.163.580	45,24%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.143.000	8.531.420	15.611.580	35,34%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.200.000	5.648.000	1.552.000	78,44%
686285 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		16.618.582.000	12.620.508.922	3.998.073.078	75,94%
OPERASIONAL		16.402.684.000	12.555.235.922	3.847.448.078	76,54%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	16.402.684.000	12.555.235.922	3.847.448.078	76,54%
EBA.994	Layanan Perkantoran	16.402.684.000	12.555.235.922	3.847.448.078	76,54%
001	Gaji dan Tunjangan	11.700.566.000	10.307.319.973	1.393.246.027	88,09%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.702.118.000	2.247.915.949	2.454.202.051	47,81%
NON OPERASIONAL		215.898.000	65.273.000	150.625.000	30,23%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	52.122.000	6.040.000	46.082.000	11,59%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	9.560.000	1.810.000	7.750.000	18,93%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	42.562.000	4.230.000	38.332.000	9,94%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	31.750.000	30.400.000	1.350.000	95,75%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	31.750.000	30.400.000	1.350.000	95,75%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	9.108.000	3.242.000	5.866.000	35,60%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.108.000	3.242.000	5.866.000	35,60%

4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	6.550.000	3.475.000	3.075.000	53,05%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	6.550.000	3.475.000	3.075.000	53,05%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	16.700.000	6.546.000	10.154.000	39,20%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.700.000	6.546.000	10.154.000	39,20%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	42.990.000	8.327.000	34.663.000	19,37%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	7.525.000	1.140.000	6.385.000	15,15%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	35.465.000	7.187.000	28.278.000	20,27%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	56.678.000	7.243.000	49.435.000	12,78%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	48.028.000	6.943.000	41.085.000	14,46%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	8.650.000	300.000	8.350.000	3,47%
686264 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG		38.976.351.000	30.174.739.982	8.801.611.018	77,42%
OPERASIONAL		38.386.954.000	29.976.782.025	8.410.171.975	78,09%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	38.386.954.000	29.976.782.025	8.410.171.975	78,09%
EBA.994	Layanan Perkantoran	38.386.954.000	29.976.782.025	8.410.171.975	78,09%
001	Gaji dan Tunjangan	30.662.550.000	24.734.349.938	5.928.200.062	80,67%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.724.404.000	5.242.432.087	2.481.971.913	67,87%
NON OPERASIONAL		589.397.000	197.957.957	391.439.043	33,59%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	75.506.000	57.455.300	18.050.700	76,09%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8.140.000	2.350.000	5.790.000	28,87%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	67.366.000	55.105.300	12.260.700	81,80%
7013	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	59.750.000	39.401.000	20.349.000	65,94%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	59.750.000	39.401.000	20.349.000	65,94%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	22.308.000	4.654.550	17.653.450	20,86%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22.308.000	4.654.550	17.653.450	20,86%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	7.600.000	2.520.000	5.080.000	33,16%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	7.600.000	2.520.000	5.080.000	33,16%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	34.120.000	24.189.100	9.930.900	70,89%

EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	34.120.000	24.189.100	9.930.900	70,89%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	308.116.000	27.559.000	280.557.000	8,94%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	4.556.000	730.000	3.826.000	16,02%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	259.320.000	0	259.320.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	44.240.000	26.829.000	17.411.000	60,64%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	81.997.000	42.179.007	39.817.993	51,44%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	57.697.000	27.394.007	30.302.993	47,48%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	24.300.000	14.785.000	9.515.000	60,84%

4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tertinggi per 31 Agustus 2026 berdasarkan Realisasi AkruaI pada Aplikasi SAKTI

Realisasi anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) tertinggi sampai dengan 31 Agustus 2026 adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (101,93%), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Probolinggo (100,49%), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan (98,53%), Sekretariat Bawaslu Kota Padang (98,43%) dan Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon (97,16%). Rincian belanja berdasarkan operasional dan non operasional sebagai berikut:

URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
686520 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN RAJA AMPAT		2.962.581.000	3.019.716.242	-57.135.242	101,93%
OPERASIONAL		2.939.753.000	2.999.006.242	-59.253.242	102,02%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	2.939.753.000	2.999.006.242	-59.253.242	102,02%
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.939.753.000	2.999.006.242	-59.253.242	102,02%
001	Gaji dan Tunjangan	1.667.684.000	1.935.620.253	-267.936.253	116,07%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.272.069.000	1.063.385.989	208.683.011	83,59%
NON OPERASIONAL		22.828.000	20.710.000	2.118.000	90,72%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.311.000	1.133.000	1.178.000	49,03%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	390.000	0	390.000	0,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.921.000	1.133.000	788.000	58,98%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	987.000	922.000	65.000	93,41%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	987.000	922.000	65.000	93,41%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	250.000	250.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	250.000	250.000	0	100,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.210.000	1.210.000	0	100,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.210.000	1.210.000	0	100,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	11.564.000	10.693.000	871.000	92,47%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	250.000	250.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.314.000	10.443.000	871.000	92,30%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	6.506.000	6.502.000	4.000	99,94%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.306.000	6.302.000	4.000	99,94%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200.000	200.000	0	100,00%

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp2.962.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.019.716.242,00 atau sebesar **101,93%**. Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp2.939.753.000,00, realisasi sebesar **102,02%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp22.828.000,00, realisasi sebesar Rp20.710.000,00 atau sebesar **90,72%**.

Ditemukannya nilai realisasi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan pagu pada Rincian Kertas Kerja menunjukkan adanya selisih antara nilai transaksi yang telah diakui secara akrual dengan alokasi anggaran pada RKK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi karena persentase realisasi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya transaksi yang belum termapping secara tepat, perbedaan periode pengakuan, transaksi koreksi/reklasifikasi, atau perubahan alokasi anggaran yang belum tercermin dalam data pembanding.

691818 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO		1.608.918.000	1.616.749.205	-7.831.205	100,49%
OPERASIONAL		1.596.975.000	1.606.607.705	-9.632.705	100,60%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.596.975.000	1.606.607.705	-9.632.705	100,60%
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.596.975.000	1.606.607.705	-9.632.705	100,60%
001	Gaji dan Tunjangan	1.168.428.000	1.326.811.373	-158.383.373	113,56%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	428.547.000	279.796.332	148.750.668	65,29%
NON OPERASIONAL		11.943.000	10.141.500	1.801.500	84,92%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3.688.000	2.396.000	1.292.000	64,97%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.600.000	1.597.500	2.500	99,84%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.088.000	798.500	1.289.500	38,24%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	875.000	800.000	75.000	91,43%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	875.000	800.000	75.000	91,43%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	200.000	111.000	89.000	55,50%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	200.000	111.000	89.000	55,50%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	400.000	335.000	65.000	83,75%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	400.000	335.000	65.000	83,75%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	5.980.000	5.742.000	238.000	96,02%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	200.000	180.000	20.000	90,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.780.000	5.562.000	218.000	96,23%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	800.000	757.500	42.500	94,69%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	600.000	565.000	35.000	94,17%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200.000	192.500	7.500	96,25%

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp1.608.918.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.616.749.205,00 atau sebesar **100,49%**. Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp1.596.975.000,00, realisasi sebesar **100,60%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp11.943.000,00, realisasi sebesar Rp10.141.500,00 atau sebesar **84,92%**.

Ditemukannya nilai realisasi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan pagu pada Rincian Kertas Kerja menunjukkan adanya selisih antara nilai transaksi yang telah diakui secara akrual dengan alokasi anggaran pada RKK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi karena persentase realisasi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya transaksi yang belum termapping secara tepat, perbedaan periode pengakuan, transaksi koreksi/reklasifikasi, atau perubahan alokasi anggaran yang belum tercermin dalam data pembanding.

686107 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ASAHAN		3.254.973.000	3.207.065.642	47.907.358	98,53%
OPERASIONAL		3.247.722.000	3.202.678.642	45.043.358	98,61%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	3.247.722.000	3.202.678.642	45.043.358	98,61%
EBA.994	Layanan Perkantoran	3.247.722.000	3.202.678.642	45.043.358	98,61%
001	Gaji dan Tunjangan	2.491.206.000	2.638.217.793	-147.011.793	105,90%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	756.516.000	564.460.849	192.055.151	74,61%
NON OPERASIONAL		7.251.000	4.387.000	2.864.000	60,50%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.780.000	1.410.000	370.000	79,21%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.040.000	670.000	370.000	64,42%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	740.000	740.000	0	100,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	500.000	0	500.000	0,00%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	500.000	0	500.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	404.000	404.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	404.000	404.000	0	100,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	808.000	0	808.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	808.000	0	808.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	2.011.000	825.000	1.186.000	41,02%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	340.000	0	340.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.671.000	825.000	846.000	49,37%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.748.000	1.748.000	0	100,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.278.000	1.278.000	0	100,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	470.000	470.000	0	100,00%

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp3.254.973.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.207.065.642,00 atau sebesar **98,53%**. Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp3.247.722.000,00, realisasi sebesar **98,61%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp7.251.000,00, realisasi sebesar Rp4.387.000,00 atau sebesar **60,50%**.

Ditemukannya nilai realisasi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan pagu pada Rincian Kertas Kerja menunjukkan adanya selisih antara nilai transaksi yang telah diakui secara akrual dengan alokasi anggaran pada RKK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi karena persentase realisasi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya transaksi yang belum termapping secara tepat, perbedaan periode pengakuan, transaksi koreksi/reklasifikasi, atau perubahan alokasi anggaran yang belum tercermin dalam data pembanding.

686119 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG		3.150.658.000	3.101.183.677	49.474.323	98,43%
OPERASIONAL		3.142.768.000	3.096.833.677	45.934.323	98,54%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	3.142.768.000	3.096.833.677	45.934.323	98,54%
EBA.994	Layanan Perkantoran	3.142.768.000	3.096.833.677	45.934.323	98,54%
001	Gaji dan Tunjangan	2.348.795.000	2.478.695.425	-129.900.425	105,53%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	793.973.000	618.138.252	175.834.748	77,85%
NON OPERASIONAL		7.890.000	4.350.000	3.540.000	55,13%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.046.000	850.000	1.196.000	41,54%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	300.000	150.000	150.000	50,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.746.000	700.000	1.046.000	40,09%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	950.000	800.000	150.000	84,21%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	950.000	800.000	150.000	84,21%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	540.000	540.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	540.000	540.000	0	100,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	610.000	460.000	150.000	75,41%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	610.000	460.000	150.000	75,41%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	750.000	300.000	450.000	40,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	150.000	150.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	600.000	150.000	450.000	25,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2.994.000	1.400.000	1.594.000	46,76%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.844.000	1.400.000	1.444.000	49,23%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	150.000	0	150.000	0,00%

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp3.150.658.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.101.183.677,00 atau sebesar **98,43%**. Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp3.142.768.000,00, realisasi sebesar **98,54%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp7.890.000,00, realisasi sebesar Rp4.350.000,00 atau sebesar **55,13%**.

Ditemukannya nilai realisasi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan pagu pada Rincian Kertas Kerja menunjukkan adanya selisih antara nilai transaksi yang telah diakui secara akrual dengan alokasi anggaran pada RKK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi karena persentase realisasi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya transaksi yang belum termapping secara tepat, perbedaan periode pengakuan, transaksi koreksi/reklasifikasi, atau perubahan alokasi anggaran yang belum tercermin dalam data pembanding.

419778 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA CILEGON		2.625.116.000	2.550.524.805	74.591.195	97,16%
OPERASIONAL		2.611.241.000	2.541.272.305	69.968.695	97,32%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	2.611.241.000	2.541.272.305	69.968.695	97,32%
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.611.241.000	2.541.272.305	69.968.695	97,32%
001	Gaji dan Tunjangan	1.641.607.000	1.834.776.707	-193.169.707	111,77%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	969.634.000	706.495.598	263.138.402	72,86%
NON OPERASIONAL		13.875.000	9.252.500	4.622.500	66,68%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3.439.000	2.677.500	761.500	77,86%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	0	0	0	#DIV/0!
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.439.000	2.677.500	761.500	77,86%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	875.000	875.000	0	100,00%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	875.000	875.000	0	100,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	1.700.000	1.590.000	110.000	93,53%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	1.700.000	1.590.000	110.000	93,53%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	20.000	0	20.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.000	0	20.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	7.841.000	4.110.000	3.731.000	52,42%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	20.000	0	20.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.821.000	4.110.000	3.711.000	52,55%
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp2.625.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.550.524.805,00 atau sebesar 97,16% . Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp2.611.241.000,00, realisasi sebesar 97,32% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp13.875.000,00, realisasi sebesar Rp9.252.500,00 atau sebesar 66,68% . Ditemukannya nilai realisasi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan pagu pada Rincian Kertas Kerja menunjukkan adanya selisih antara nilai transaksi yang telah diakui secara akrual dengan alokasi anggaran pada RKK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi karena persentase realisasi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya transaksi yang belum termapping secara tepat, perbedaan periode pengakuan, transaksi koreksi/reklasifikasi, atau perubahan alokasi anggaran yang belum tercermin dalam data pembanding.					

5. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Terendah per 31 Agustus 2026 berdasarkan Realisasi Akrual pada Aplikasi SAKTI

Realisasi anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) terendah sampai dengan 31 Agustus 2026 adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (0,00%), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai (22,03%), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (35,09%), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur (38,28%) dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser (38,43%). Rincian belanja berdasarkan operasional dan non operasional sebagai berikut:

URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
691859 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG		902.678.000	0	902.678.000	0,00%
OPERASIONAL		891.639.000	0	891.639.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	891.639.000	0	891.639.000	0,00%
EBA.994	Layanan Perkantoran	891.639.000	0	891.639.000	0,00%
001	Gaji dan Tunjangan	630.402.000	0	630.402.000	0,00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	261.237.000	0	261.237.000	0,00%

NON OPERASIONAL		11.039.000	0	11.039.000	0,00%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3.031.000	0	3.031.000	0,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	600.000	0	600.000	0,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.431.000	0	2.431.000	0,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	1.110.000	0	1.110.000	0,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.110.000	0	1.110.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	530.000	0	530.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	530.000	0	530.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	775.000	0	775.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	775.000	0	775.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	3.184.000	0	3.184.000	0,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	465.000	0	465.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.719.000	0	2.719.000	0,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2.409.000	0	2.409.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.849.000	0	1.849.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	560.000	0	560.000	0,00%
Catatan: Sedang berproses pergantian KPPN sehingga belum ada inputan pada aplikasi SAKTI					
691855 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI		661.729.000	145.761.049	515.967.951	22,03%
OPERASIONAL		653.272.000	143.301.049	509.970.951	21,94%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	653.272.000	143.301.049	509.970.951	21,94%
EBA.994	Layanan Perkantoran	653.272.000	143.301.049	509.970.951	21,94%
001	Gaji dan Tunjangan	392.043.000	118.990.000	273.053.000	30,35%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	261.229.000	24.311.049	236.917.951	9,31%
NON OPERASIONAL		8.457.000	2.460.000	5.997.000	29,09%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3.617.000	1.190.000	2.427.000	32,90%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	456.000	0	456.000	0,00%

BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.161.000	1.190.000	1.971.000	37,65%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	50.000	0	50.000	0,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50.000	0	50.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	285.000	285.000	0	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	285.000	285.000	0	100,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.410.000	320.000	1.090.000	22,70%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.410.000	320.000	1.090.000	22,70%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.425.000	285.000	1.140.000	20,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	285.000	0	285.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.140.000	285.000	855.000	25,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.670.000	380.000	1.290.000	22,75%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	910.000	0	910.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	760.000	380.000	380.000	50,00%
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp661.729.000,00 dengan realisasi sebesar Rp145.761.049,00 atau sebesar 22,03% . Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp653.272.000,00, realisasi sebesar 21,94% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp8.457.000,00, realisasi sebesar Rp2.460.000,00 atau sebesar 29,09% .					
691856 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN		472.224.000	165.714.510	306.509.490	35,09%
OPERASIONAL		462.867.000	162.190.510	300.676.490	35,04%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	462.867.000	162.190.510	300.676.490	35,04%
EBA.994	Layanan Perkantoran	462.867.000	162.190.510	300.676.490	35,04%
001	Gaji dan Tunjangan	262.201.000	64.744.200	197.456.800	24,69%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	200.666.000	97.446.310	103.219.690	48,56%
NON OPERASIONAL		9.357.000	3.524.000	5.833.000	37,66%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3.617.000	2.768.000	849.000	76,53%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	456.000	0	456.000	0,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.161.000	2.768.000	393.000	87,57%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	50.000	0	50.000	0,00%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50.000	0	50.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	285.000	0	285.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	285.000	0	285.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.410.000	0	1.410.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.410.000	0	1.410.000	0,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.425.000	0	1.425.000	0,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	285.000	0	285.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.140.000	0	1.140.000	0,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2.570.000	756.000	1.814.000	29,42%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.810.000	0	1.810.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	760.000	756.000	4.000	99,47%

Catatan:

Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp472.224.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.714.510,00 atau sebesar **35,09%**. Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp462.867.000,00, realisasi sebesar **35,04%**. Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp9.357.000,00, realisasi sebesar Rp3.524.000,00 atau sebesar **37,66%**.

691836 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR		1.229.863.000	470.749.683	759.113.317	38,28%
OPERASIONAL		1.228.973.000	470.039.683	758.933.317	38,25%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.228.973.000	470.039.683	758.933.317	38,25%
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.228.973.000	470.039.683	758.933.317	38,25%
001	Gaji dan Tunjangan	892.107.000	416.700.763	475.406.237	46,71%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	336.866.000	53.338.920	283.527.080	15,83%
NON OPERASIONAL		890.000	710.000	180.000	79,78%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100.000	40.000	60.000	40,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	40.000	40.000	0	100,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	60.000	0	60.000	0,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	550.000	550.000	0	100,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	550.000	550.000	0	100,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	40.000	0	40.000	0,00%

EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	40.000	0	40.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	40.000	40.000	0	100,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.000	40.000	0	100,00%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	100.000	60.000	40.000	60,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	20.000	0	20.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	60.000	20.000	75,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	60.000	20.000	40.000	33,33%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.000	0	40.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	20.000	20.000	0	100,00%
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp1.229.863.000,00 dengan realisasi sebesar Rp470.749.683,00 atau sebesar 38,28% . Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp1.228.973.000,00, realisasi sebesar 38,25% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp890.000,00, realisasi sebesar Rp710.000,00 atau sebesar 79,78% .					
691835 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASER		1.106.204.000	425.060.198	681.143.802	38,43%
OPERASIONAL		1.105.314.000	425.060.198	680.253.802	38,46%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.105.314.000	425.060.198	680.253.802	38,46%
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.105.314.000	425.060.198	680.253.802	38,46%
001	Gaji dan Tunjangan	738.960.000	345.885.589	393.074.411	46,81%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	366.354.000	79.174.609	287.179.391	21,61%
NON OPERASIONAL		890.000	0	890.000	0,00%
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100.000	0	100.000	0,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	40.000	0	40.000	0,00%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	60.000	0	60.000	0,00%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	550.000	0	550.000	0,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	550.000	0	550.000	0,00%
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	40.000	0	40.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Dukungan Internal	40.000	0	40.000	0,00%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	40.000	0	40.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.000	0	40.000	0,00%

6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	100.000	0	100.000	0,00%
EBA.Z07	Layanan BMN pada Satker Vertikal	20.000	0	20.000	0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	0	80.000	0,00%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	60.000	0	60.000	0,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.000	0	40.000	0,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	20.000	0	20.000	0,00%
Catatan: Sampai dengan 31 Agustus 2026 memiliki pagu sebesar Rp1.106.204.000,00 dengan realisasi sebesar Rp425.060.198,00 atau sebesar 38,43% . Untuk pagu Operasional, pagu anggaran sebesar Rp1.105.314.000,00, realisasi sebesar 38,46% . Sedangkan anggaran Non Operasional dengan pagu sebesar Rp890.000,00, realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% .					